

Dalam pandangan teori Power and Interdependence, kerja sama QRIS lintas negara merupakan bentuk *functional cooperation* yang muncul untuk menghadapi masalah bersama dan menciptakan keuntungan kolektif melalui institusi internasional. Keohane dan Nye (2011) berpendapat bahwa institusi diperlukan untuk memfasilitasi koordinasi, transparansi, dan mengurangi biaya transaksi dalam hubungan antarnegara. Hal ini tercermin dalam kerja sama QR cross-border yang membutuhkan keselarasan standar keamanan, interoperabilitas sistem, serta pembagian tanggung jawab risiko antarotoritas moneter dan penyelenggara jasa pembayaran. Dengan demikian, strategi penguatan kerja sama Indonesia dalam implementasi QRIS lintas negara tidak dapat dipahami sekadar sebagai teknokrasi pembayaran digital, tetapi merupakan langkah memperkuat tata kelola interdependensi ekonomi digital ASEAN. Kesimpulan ini membuka ruang bagi penguatan peran institusi regional dan integrasi sistem pembayaran nasional menuju arsitektur pembayaran ASEAN yang lebih terhubung dan inklusif dalam jangka panjang.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan dalam konteks akademik. Pertama, penggunaan teori interdependensi Keohane dan Nye sudah membantu memahami hubungan ketergantungan antarnegara dalam kerja sama pembayaran digital, namun penelitian berikutnya dapat menambahkan perspektif teori lain seperti teori rezim internasional atau tata kelola global untuk melihat bagaimana aturan dan institusi regional dibentuk dalam kerja sama sistem pembayaran ASEAN.

Kedua, lingkup penelitian masih terbatas pada tiga negara mitra awal (Thailand, Malaysia, dan Singapura). Penelitian mendatang dapat memperluas objek studi ke negara ASEAN lainnya untuk melihat proses integrasi yang lebih

menyeluruh dalam kerangka ASEAN Payment Connectivity. Selain itu, penelitian jangka panjang dapat dilakukan untuk mengukur dampak kerja sama QR cross-border terhadap inklusi keuangan dan integrasi ekonomi digital kawasan.

6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian ini, penguatan kerja sama QRIS lintas negara di kawasan ASEAN membutuhkan upaya lanjutan dari berbagai pihak. Pemerintah dan otoritas moneter seperti Bank Indonesia perlu mendorong percepatan harmonisasi standar keamanan, regulasi, dan mekanisme settlement lintas negara agar implementasi QRIS dapat berjalan lebih konsisten di seluruh negara mitra. Penyelarasan aturan teknis dan pertukaran data antarlembaga juga perlu diperkuat untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan dan risiko transaksi.

Di sisi lain, penyelenggara jasa pembayaran dan pelaku industri fintech perlu terus meningkatkan kapasitas infrastruktur dan sistem backend agar mampu menangani volume transaksi lintas negara yang semakin meningkat. Pengembangan inovasi teknologi dan pemantauan transaksi secara real-time dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga keandalan sistem dan meningkatkan kenyamanan pengguna.

Peningkatan literasi dan kesiapan merchant juga menjadi aspek penting. Proses edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar merchant memahami prosedur settlement lintas negara serta aspek keamanan transaksi digital. Dengan meningkatnya pemahaman merchant, kepercayaan pengguna akan ikut bertumbuh sehingga adopsi pembayaran lintas negara semakin cepat.

Selain itu, koordinasi lintas negara antara otoritas moneter, penyelenggara jasa pembayaran, dan pelaku industri perlu diperkuat melalui forum teknis bersama maupun sandbox regional untuk menguji inovasi pembayaran digital. Dengan kolaborasi yang lebih intensif, integrasi sistem pembayaran regional dapat berkembang lebih efektif dan mendukung konektivitas ekonomi digital kawasan dalam jangka panjang.